

SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 16-31 DESEMBER 2024

■ NUSANTARA

**Sultan Minta Kenaikan
PPN Ditunda**

■ GAGASAN

**Keterwakilan Timur
Dalam Pemerintahan**

Kembalikan Pilkada ke DPRD

**Wawancara dengan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung:
Kredibilitas Pilkada Serentak
Jadi Pertaruhan Demokrasi**





04 SENAT UTAMA

- Kembalikan Pilkada ke DPRD
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Perlu Disempurnakan
- Wawancara dengan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung: Kredibilitas Pilkada Serentak Jadi Pertaruhan Demokrasi
- Riwayat Pilkada di Indonesia

10 NUSANTARA

- Untuk Capai Target Prolegnas 2025: DPD RI Lakukan Kolaborasi Legislatif
- RUU MHA Masuk Prolegnas Prioritas: Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat
- RUU Perubahan UU Aceh Masuk Prolegnas 2024-2029
- Sultan Minta Kenaikan PPN Ditunda
- DPD RI Kunjungi PSN Tropical Costland, Akan Panggil Menteri Terkait
- Senator Minta Tambahan Armada Perintis di Papua
- Senator DPD RI Dukung Bangun Kampung Haji Di Makkah
- 28 Desa di Lampung Belum Dialiri Listrik
- GKR Hemas Terima Aspirasi Staf Anggota DPD RI

22 VARIA SENAT

- Komite III DPD RI Soroti Mutu Pendidikan Keagamaan
- Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, BAP Panggil Menteri ATR/BPN
- Komite IV DPD RI Pertanyakan Kebijakan Perpajakan
- Pemerintah: Agar Tidak Membebani Masyarakat

26 SEKRETARIAT JENDERAL

- Setjen DPD RI Gelar Press Gathering dengan Wartawan Parlemen

27 GALERI FOTO



28 GAGASAN

- Keterwakilan Timur Dalam Pemerintahan

30 KULINER

- Empat Kuliner Paling Dicari di Kota Kendari
Four Most Sought-After Delicacies in Kendari



Kolaborasi Legislatif

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) telah mengambil langkah strategis dalam perumusan kebijakan dengan menjadi inisiator utama empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kini termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. RUU-RUU ini mencakup isu-isu penting seperti Pengelolaan Perubahan Iklim, Perubahan Atas UU Pemerintahan Daerah, Masyarakat Hukum Adat, dan Daerah Kepulauan, yang menunjukkan respons DPD RI terhadap tantangan sosial dan lingkungan yang kian mendesak. Inisiatif ini memperlihatkan peran DPD yang krusial tidak hanya sebagai pendukung tetapi juga sebagai pemimpin dalam agenda legislatif nasional.

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, mengekspresikan optimisme dan komitmen untuk mendorong realisasi Prolegnas. Kolaborasi antara DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah dalam proses legislatif, menjadi penting dan merupakan momen krusial untuk memperkuat kapasitas DPD RI dalam kancah perumusan undang-undang. Keberhasilan empat RUU ini dalam masuk daftar Prolegnas Prioritas menandai langkah signifikan dalam penguatan peran DPD sebagai badan legislatif yang inovatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Upaya ini dirancang untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berkualitas dan memiliki legitimasi kuat, tapi juga mampu mengatasi permasalahan spesifik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah. Melalui pendekatan partisipatif ini, DPD RI berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan bersumber dari masukan yang komprehensif dan beragam, memperkaya proses legislasi di Indonesia. **(* / Pemred)**

Legislative Collaboration

The House of Regional Representative (DPD RI) has taken strategical steps in drafting policies by becoming the primary initiator of four bills which have now been included in Prioritized National Legislative Programs (Prolegnas) 2025. The Bills cover important issues such as Climate Change Management, Amendment toward Law of Regional Government, Customary Law Communities, dan Archipelago, which indicate the response of DPD RI against the ever-urging social and environmental challenges. The initiative displays the crucial role DPD, not only as supporter but also as leader in National Legislative Agenda.

The Chairman of DPD RI, Sultan B Najamudin, expresses his optimism and commitment to push the Prolegnas realization. The collaboration between DPD RI, DPR RI, and the Government in legislative process has been important and become a crucial moment to strengthen the capacity of DPD RI in the arena of bill drafting. The success of these four Bills into being listed among the Prioritized Prolegnas indicates significant step in affirming the role of DPD as an innovative and responsive legislative body toward the community dynamics.

*The endeavor is designed to produce policies which are not only qualified and strongly legitimized but also capable to resolve specific issues faced by communities in many regions. With the participative approach, DPD RI endeavors to ascertain that every issued policy originates from comprehensively diverse feedbacks which enrich the legislation process in Indonesia. **(* / Chief Editor)***



Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, pimpinan dan anggota Komite I DPD RI bersama Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP, usai menggelar raker. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

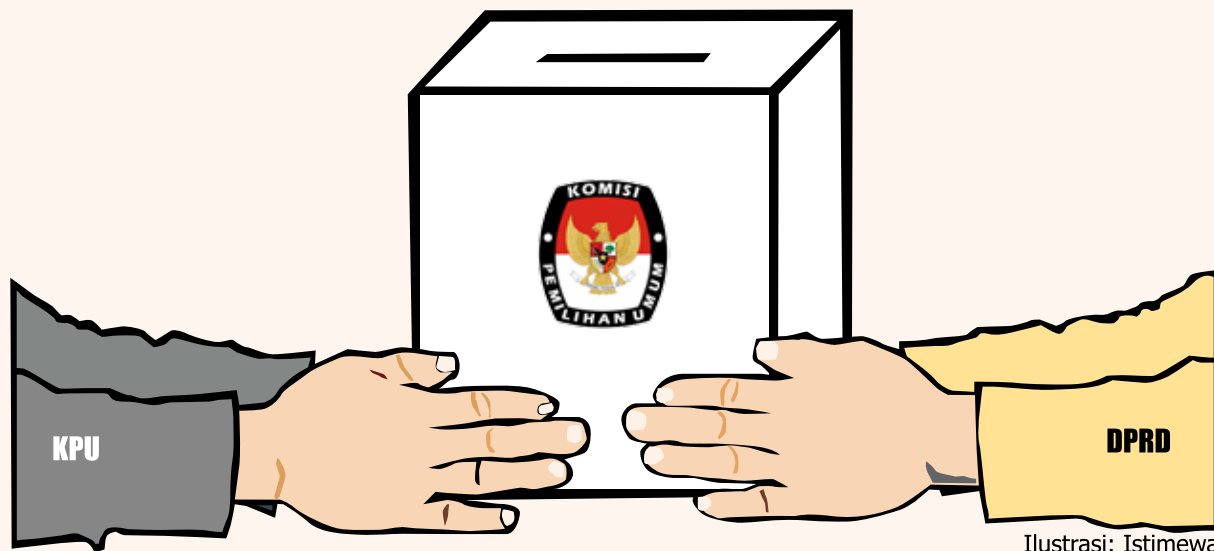
KEMBALIKAN PILKADA KE DPRD

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD. Ini respon atas turunnya partisipasi masyarakat dan maraknya politik uang?

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dalam rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (2/12), menyerukan evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI GKR

Hemas ini menyoroti penurunan partisipasi masyarakat dan maraknya praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2024.

Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menekankan pentingnya peninjauan kembali mekanisme Pilkada langsung yang terlalu berdekatan dengan pemilu presiden dan legislatif. “Kami mengajak KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengevaluasi dan membenahi penyelenggaraan Pilkada, khususnya terkait



Ilustrasi: Istimewa

praktik *money politic* dan rendahnya partisipasi pemilih,” ujar Hasdam.

Senator dari Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, mengungkapkan kekhawatiran tentang tingginya biaya kampanye yang harus dikeluarkan calon kepala daerah, yang berpotensi memperparah praktik politik uang. “Berdasarkan data yang kami peroleh, tingginya kasus politik uang dan biaya kampanye yang besar membuat penyelenggaraan Pilkada tidak baik. Ini menjadi catatan Komite I dan sudah saatnya ditinjau kembali dan mekanismenya dikembalikan ke DPRD,” kata Teras Narang.

Di sisi lain, Abdul Hakim, anggota DPD RI dari Provinsi Lampung, menyoroti perlunya perbaikan regulasi Pilkada mengingat masih maraknya praktik *money politic*. “Jika kualitas Pilkada langsung tidak menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, ada baiknya proses demokrasi tetap dijalankan melalui DPRD,” ungkap Hakim.

Senator asal Kalimantan Barat, Maria Goreti, menyangkan bahwa banyak pemilih hanya datang ke tempat pemungutan suara jika diberi imbalan. “Ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang masif dan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam memilih pimpinan daerah,” kata Goreti.

Pdt. Penrad Siagian dari Komite I DPD RI menyoroti merosotnya integritas pemilu yang terancam oleh praktik politik uang yang semakin vulgar. “Perilaku ini bukan



hanya mengkhianati proses demokrasi tetapi juga berpotensi menjadi norma merusak dalam tatanan politik negara. Banyak pelanggaran hanya dilaporkan tanpa penyelesaian yang memadai, menguap begitu saja,” jelas Siagian dengan nada frustrasi.

Diskusi ini menggarisbawahi urgensi reformasi dalam penyelenggaraan Pilkada, dengan fokus pada peningkatan integritas dan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah berikutnya yang diambil oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menjadi kunci dalam menentukan masa depan demokrasi lokal di Indonesia.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin yang hadir bersama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Ketua DKPP Heddy Lugito, mengakui partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 lebih rendah daripada pilpres dan pileg beberapa waktu lalu. Hal ini menjadi bahan evaluasi KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum ke depan. “Ini menjadi catatan kami dan akan menjadi bahan evaluasi,” jelasnya. (*)



PRABOWO SEBUT PILKADA MAHAL, SULTAN: SISTEM POLITIK PERLU DISEMPURNAKAN



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat berbincang dengan Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD. Menurut Sultan, wacana ini perlu dikaji serius karena sistem politik dan pemilu di Indonesia membutuhkan penyempurnaan.

“Pernyataan Pak Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Bahliil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses Pilkada yang semakin tidak efisien,” ujar Sultan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/12).

Sultan menjelaskan, DPD RI selama ini aktif mengawasi

pelaksanaan Pilkada serentak karena memandang Pilkada sebagai salah satu wujud otonomi daerah yang harus berjalan berkualitas. Namun, ia juga mengakui bahwa Pilkada langsung belum tentu menjamin legitimasi kuat dari rakyat, mengingat partisipasi masyarakat dalam Pilkada masih rendah, bahkan kurang dari 70 persen secara nasional.

Ia mengusulkan opsi untuk mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD, sedangkan pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung. “Pilkada gubernur, sejak awal, kurang relevan karena fungsi gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah,” tegas Sultan.

Melalui buku *Green Democracy* yang ia tulis, Sultan menawarkan berbagai opsi untuk menyederhanakan sistem politik dan meningkatkan kualitas demokrasi. Ia menilai pemilihan melalui DPRD untuk gubernur bisa lebih efektif, murah, serta membuat gubernur lebih fokus pada penerapan program pemerintah pusat tanpa tekanan politik.

DPD RI, lanjut Sultan, akan melakukan kajian mendalam terkait evaluasi sistem Pilkada dan mengumpulkan masukan dari masyarakat selama masa reses. “Pada akhirnya, kita harus mendengarkan keinginan masyarakat sambil meningkatkan kualitas demokrasi melalui edukasi politik,” tutup Sultan. (*)

Wawancara dengan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung: Kredibilitas Pilkada Serentak Jadi Pertaruhan Demokrasi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa proses Pilkada Serentak 2024 belum berakhir meskipun tahapan pencoblosan telah selesai. Tamsil menyatakan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP masih memiliki tanggung jawab besar untuk menuntaskan seluruh proses dengan kualitas tinggi, termasuk menangani pelanggaran dan sengketa yang muncul. “Pilkada bukan hanya seremoni, tetapi juga harus melahirkan legitimasi kepala daerah yang bebas dari pelanggaran agar pemerintahan daerah dapat berjalan optimal,” ucap Tamsil. Berikut petikan wawancaranya:

Apa yang menjadi perhatian utama Anda seiring berakhirnya tahapan pencoblosan Pilkada Serentak 2024?

Tahapan pencoblosan memang telah selesai, namun ini bukan berarti proses Pilkada telah berakhir sepenuhnya. Penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, masih memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses berlangsung tuntas dan berkualitas.

Dalam hal penanganan pelanggaran dan sengketa, apa yang Anda harapkan dari penyelenggara pemilu?

Pilkada bukan sekadar seremoni. Kita harus memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih bebas dari beban pelanggaran dan sengketa. Ini penting agar pemerintahan di daerah dapat berjalan optimal. Hukum harus ditegakkan secara tegas, termasuk diskualifikasi

bagi pasangan calon yang terbukti melanggar aturan.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan Presiden Prabowo tentang efisiensi Pilkada?

Pernyataan Presiden sangat relevan. Pilkada serentak memang menyedot sumber daya yang signifikan. Jika Pilkada gagal melahirkan pemimpin yang efektif, maka hal itu bisa mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu dan mungkin mengarah pada wacana kembali ke sistem Pilkada oleh DPRD. (*)



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Riwayat Pilkada di Indonesia

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia memiliki sejarah panjang yang penuh dengan dinamika politik dan perubahan sistem. Berikut adalah kronologis tentang Pilkada di Indonesia dari masa ke masa:

Masa Pendudukan Belanda

Selama era kolonial Belanda, pemimpin daerah ditunjuk secara langsung oleh pemerintah kolonial.

Jabatan tinggi di provinsi dan karesidenan biasanya diisi oleh orang-orang Belanda, sedangkan warga Indonesia hanya menduduki posisi kepala daerah di tingkat kabupaten hingga camat, dengan kewajiban memberikan upeti kepada Belanda.

Masa Pendudukan Jepang

Ketika Jepang menguasai Indonesia, sistem penunjukan pemimpin daerah masih berlanjut, meskipun dengan perubahan terminologi jabatan yang mengikuti bahasa Jepang. Pada masa ini, praktik upeti dan penunjukan tetap berlangsung.

Era Kemerdekaan Awal

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi perbaikan sistem pemerintahan. UU No. 1 tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah ditetapkan, di mana kepala daerah memiliki fungsi sebagai pemimpin komite nasional daerahnya.

Reformasi Tahun 1948

Pada 1948, UU Pengganti tahun 1945 diperkenalkan, memberikan sistem yang lebih transparan. Gubernur ditetapkan oleh Presiden dengan rekomendasi dari DPRD Provinsi, sementara bupati dan kepala desa direkomendasikan oleh DPRD tingkat daerah dan desa.

Era UUDS 1950

Perubahan konstitusi pada tahun 1950 menjadi UUDS 1950 mengubah sedikit sistem, dengan provinsi disebut daerah tingkat I dan kota atau kabupaten sebagai daerah tingkat II, dan seterusnya.

Kembali ke UUD 1945

Setelah UUDS 1950 dikembalikan ke UUD 1945, sistem pemilihan kepala daerah menjadi lebih terpusat di mana DPRD hanya merekomendasikan nama dan Presiden serta Mendagri yang menentukan.

Masa Orde Baru

Di era Presiden Soeharto, UU No. 5 tahun 1974 diterbitkan, yang memberikan Presiden kontrol penuh atas penetapan kepala daerah, berdasarkan rekomendasi DPRD yang memenuhi syarat.

Reformasi dan Setelahnya

Setelah runtuhnya Orde Baru, UU No. 22 tahun 1999 diterbitkan, memberikan DPRD wewenang penuh dalam pemilihan kepala daerah. Namun, praktik politik uang merusak sistem ini, dengan anggota DPRD seringkali menerima suap dari calon kepala daerah.

Era Pemilihan Langsung

UU No. 32 tahun 2004 memperkenalkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, dengan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik.

Pilkada oleh Perseorangan

UU No. 12 tahun 2008 memungkinkan calon perseorangan mendaftar sebagai kandidat dengan dukungan masyarakat, tanpa harus bergabung dengan partai politik.

Pilkada Serentak di Indonesia Masa ke Masa

Pada 27 November 2024, untuk kelima kalinya pemilihan kepala daerah secara serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia



Yuk, Intip Perjalanannya di Indonesia



● Pilkada Serentak 2024

Digelar untuk daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada 2022-2024



Jumlah pemilih
207,1 juta



Waktu pelaksanaan
27 November 2024



Digelar di
37 provinsi, 508 kabupaten/kota



● Pilkada Serentak 2020

Digelar untuk daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada 2020



Jumlah pemilih
100,3 juta



Waktu pelaksanaan
9 Desember 2020



Digelar di
9 provinsi, 261 kabupaten/kota

Kembali ke DPRD

Di akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UU 22/2014 sempat mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD, namun mendapat penolakan luas sehingga dicabut.

Pemilihan Langsung Serentak

Di bawah Presiden Joko Widodo, UU 1/2015 menetapkan pemilihan kepala daerah secara langsung, membatalkan UU sebelumnya dan menandai era pilkada serentak. (*)



Ketua DPD RI Sultan B
Najamudin bersama Wakil
Ketua DPD RI GKR Hemas, Yorrys
Raweyai dan Tamsil Linrung.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



UNTUK CAPAI TARGET PROLEGNAS 2025: DPD RI LAKUKAN KOLABORASI LEGISLATIF

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menandai babak baru dalam kolaborasi legislatif dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah, menyusul persetujuan penting dari sidang pleno DPR RI pada 19 November 2024. Dalam sidang tersebut, DPR RI telah mengesahkan masuknya 176 Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk periode 2025-2029 dan menetapkan 41 RUU sebagai prioritas untuk tahun 2025. DPD RI, yang berdampingan dengan DPR, telah mengajukan 109 RUU, dengan 15 di antaranya mendapat status sebagai Prolegnas Prioritas.

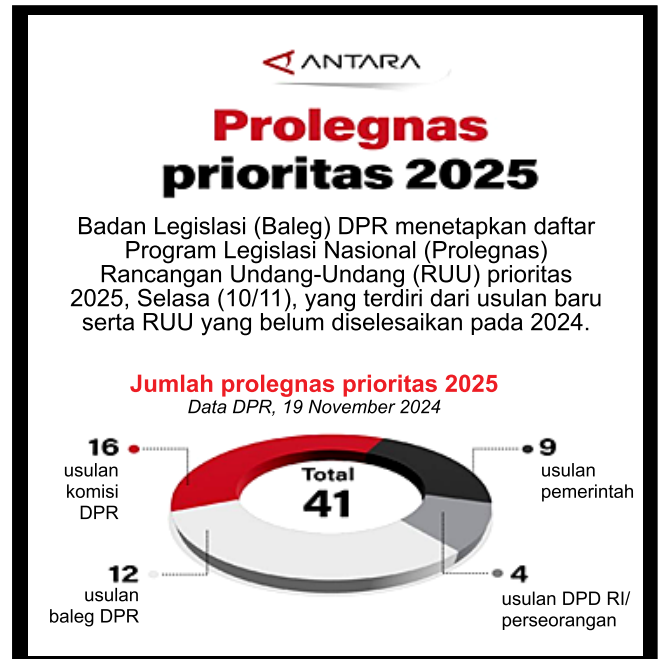
Dalam kelompok 41 RUU Prolegnas Prioritas yang telah ditetapkan, empat di antaranya merupakan usulan dari DPD RI, yaitu: RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Perubahan Atas UU Pemerintahan Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan. Inisiatif ini menggambarkan komitmen DPD RI dalam menghadapi isu-isu strategis yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan negara.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, mengungkapkan penghargaan mendalam atas penetapan Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 oleh Badan Legislasi DPR. Sultan menegaskan dedikasi DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam kolaborasi legislatif dengan DPR RI dan pemerintah, guna mengoptimalkan pencapaian target dari kedua agenda legislatif tersebut.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada Rabu, 20 November 2024, Sultan B Najamudin berkata, “Alhamdulillah, melalui kerja keras Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, kami telah mencapai kesepakatan komprehensif dengan Badan Legislasi DPR RI untuk memprioritaskan puluhan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kami bertekad untuk bekerja bersama DPR dan pemerintah agar RUU-RUU ini dapat diolah menjadi undang-undang yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat.”

Komitmen ini diperkuat dengan strategi DPD RI yang inklusif dan komprehensif dalam melanjutkan penulisan RUU. Sultan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat luas, dukungan akademisi, dan pakar dalam penyusunan RUU, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim, yang memerlukan pendekatan yang spesifik namun menyeluruh.

Sebagai lembaga legislatif yang kini mendapat kepercayaan untuk menyusun RUU prioritas, DPD RI memandang ini sebagai sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar. “Meskipun kapasitas kami dalam legislasi masih berkembang, kami yakin dengan pendekatan kolaboratif ini, komunikasi intensif kami dengan semua pihak, termasuk ketua umum partai politik



dan presiden, akan membawa hasil yang substansial dalam proses pembuatan undang-undang,” pungkas Sultan B Najamudin. (*)



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



RUU MHA Masuk Prolegnas Prioritas: PENGAKUAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT

Setelah perjuangan panjang yang dilakukan oleh banyak pihak, akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) resmi menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Keputusan ini diumumkan pada rapat paripurna DPR RI, membawa angin segar bagi masyarakat adat di Indonesia yang telah lama menantikan pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

Pdt. Penrad Siagian, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara, menyampaikan kegembiraannya dalam sebuah wawancara di Jakarta, Jumat (22/11/2024). “Ini adalah momen yang telah lama dinantikan oleh masyarakat hukum adat di seluruh nusantara. Keberadaan RUU ini diharapkan dapat mengakhiri banyak ketidakadilan yang mereka alami, termasuk kriminalisasi dan perampasan tanah ulayat” ujarnya.

RUU MHA bukan satu-satunya usulan dari DPD RI yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Tiga RUU lainnya, yaitu tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, Perubahan Atas UU Pemerintahan Daerah, dan Daerah Kepulauan

juga termasuk dalam daftar ini. Khusus untuk RUU Daerah Kepulauan, ini adalah kali ketiga usulan tersebut berhasil masuk dalam agenda legislatif prioritas.

Penrad menekankan pentingnya pengesahan RUU MHA dalam sebuah rapat di Komite I DPD RI pada 15 Oktober 2024. “Kami tidak dapat lagi menoleransi keterlambatan dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Kasus-kasus di Dolok Parmonangan, Sihaporas, Sigala-gala di Sumatera Utara, serta Nangahale di Sikka, NTT dan berbagai masyarakat adat di Papua, menunjukkan urgensi dari RUU ini,” katanya.

(*)



Penrad Siagian (Foto Istimewa)

RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2025

Dari 41 RUU Prioritas dalam Prolegnas Prioritas 2025 yang sudah disepakati DPR RI, 4 di antaranya sebagai usulan DPD RI atau gabungan, sebagai berikut:

Usulan DPD RI/Perseorangan

1. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR dan DPD RI)
2. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (anggota DPR dan DPD RI)
3. RUU tentang Perubahan keempat

atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diusulkan F PDIP, PKB, DPD RI)

Usulan Inisiatif DPD RI

4. RUU tentang Daerah Kepulauan



Azhari Cage (anggota PPUU), Sewitri (Wakil Ketua PPUU) dan Abdul Kholik (Ketua PPUU) dalam rapat pembahasan Prolegnas 2025-2029, di Baleg DPR RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

RUU PERUBAHAN UU ACEH MASUK PROLEGNAS 2024-2029

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Aceh Azhari Cage, menyatakan kegembiraannya atas masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk periode 2025-2029. Kebahagiaan ini disampaikannya usai menghadiri rapat pembahasan Prolegnas di Baleg DPR RI pada Senin, 18 November 2024.

“Keterlibatan RUU ini dalam Prolegnas merupakan hasil dari kerja keras bersama. Pembahasan mendatang diharapkan membawa penyesuaian atas otonomi khusus dan kewenangan Aceh, sejalan dengan perkembangan terkini dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Panwaslih,” ujar Azhari. Anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI ini menekankan pentingnya

partisipasi semua elemen masyarakat Aceh dalam mengawal pembahasan ini yang dijadwalkan pada tahun 2025, untuk memastikan bahwa revisi UUPA sesuai dengan semangat perdamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Sebagai anggota PPUU, Panitia Musyawarah, dan Badan Kehormatan DPD RI, Azhari juga aktif dalam Komite II DPD RI yang membidangi infrastruktur, BUMN, perkebunan, perikanan, dan peternakan. “Insya Allah, saya akan terus mengawal pembahasan ini agar dana otonomi khusus Aceh dapat berkelanjutan,” tegas Azhari, menunjukkan komitmennya terhadap pemenuhan kebutuhan dan keadilan sosial di Aceh.

Masuknya RUU ini ke dalam Prolegnas tidak hanya mencerminkan kebutuhan legislatif, tetapi juga harapan besar untuk memperkuat otonomi khusus di Aceh, provinsi yang memiliki sejarah dan kekhususan tersendiri. (*)



SULTAN MINTA KENAIKAN PPN DITUNDA

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk mengkaji kembali atau setidaknya menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025. Menaikkan PPN dinilai kontraproduktif dengan semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena berpotensi meningkatkan inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung setiap upaya pemerintah dalam


meningkatkan pendapatan negara. Kebutuhan anggaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita sangat banyak. Tapi waktunya belum tepat,” ujar Sultan, Selasa (19/11/2024).

Mantan aktivis KNPI itu mengatakan bahwa pihaknya lebih mendorong pemerintah untuk sebaiknya fokus meningkatkan *tax ratio* yang saat ini masih di angka 10 persen, menjadi 15 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) atau bahkan lebih. Karena itu, dia menyarankan pemerintah melalui

Kementerian Keuangan sebaiknya fokus mengembangkan inovasi pada peningkatan ratio pajak. Masih banyak kebocoran pajak yang perlu diperbaiki.

Sultan mengaku banyak sekali mendengar keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan para pelaku usaha. Dengan PPN 12 persen, Indonesia akan sama dengan Filipina sebagai negara dengan PPN tertinggi di ASEAN. Dia mengusulkan agar kenaikan PPN khusus diberlakukan terhadap produk impor saja, guna mendukung dan melindungi kepentingan industri dalam negeri.

Sultan menyatakan lembaga yang dipimpinnya akan mendukung jika kebijakan tersebut telah melalui proses kajian dan hitungan yang matang oleh pemerintah. “Kami percaya pemerintah telah melakukan kajian dan hitungan terkait dampak kebijakan tersebut bersama Badan Anggaran DPR, sehingga kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kenaikan PPN 12 persen kepada pemerintah,” tutupnya. (*)



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

DPD RI KUNJUNGI PSN TELUK NAGA, AKAN PANGGIL MENTERI TERKAIT



Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai (dua dari kanan) bersama sejumlah senator mengunjungi lokasi PSN PIK 2 yang masih berpolemik. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai bersama sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD RI, melakukan kunjungan advokasi ke Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Costland di kawasan PIK 2, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin (9/12). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi di lapangan dan menyikapi polemik yang berkembang di masyarakat terkait proyek tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Yorrys menyampaikan bahwa hasil advokasi menunjukkan tidak ada penduduk yang tinggal di area PSN karena wilayah tersebut merupakan hutan lindung yang telah mengalami abrasi. “Kesimpulan sementara, kami mengetahui bahwa apa yang menjadi polemik ternyata tidak ada, hanya sejumlah pihak yang mendramatisir saja,” ujarnya.

Yorrys juga menyatakan akan memanggil

sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang sebelumnya mengeluarkan pernyataan terkait ketidaksesuaian tata ruang proyek tersebut. “Kami sudah melakukan audiensi dengan pihak pengelola dan tahapan diskusi dengan pemerintah, tetapi anehnya sudah ada *statement* yang dibuat meski proses belum selesai,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua BAP DPD RI Yulianus Henock Sumual, menekankan pentingnya pengawasan atas aspirasi masyarakat yang diterima DPD RI. “Kami ingin tahu yang mana yang benar. Jangan sampai kepentingan masyarakat disebar isu negatif yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri,” kata Henock.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menekankan perlunya melibatkan masyarakat setempat dalam pembangun-



an dan operasional PSN. “Kami berharap masyarakat di sekitar direkrut sebagai tenaga kerja. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton,” tegas Filep.

Estate Management Director PT. Agung Sedayu Restu Mahesa, menjelaskan bahwa proyek PSN Tropical Costland berbeda dengan PIK 2 dan sepenuhnya dibiayai pihak swasta. Proyek ini bertujuan mengatasi abrasi, memulihkan zona hijau, dan menciptakan lapangan kerja. “Kami harapkan proyek ini dapat membuka lapangan kerja untuk 6.000 warga selama pembangunan dan lebih dari 13.000 saat beroperasi,” katanya.

Ketua APDESI Nasional Surta Wijaya, menyampaikan bahwa masyarakat di sekitar proyek tidak menolak pembangunan. “Masyarakat mendukung pembangunan ini, meskipun menitipkan sejumlah harapan untuk kebaikan masyarakat dan daerah ini ke depannya,” ujarnya.

Kunjungan ini dihadiri pula oleh sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD RI, termasuk Badikenita Br Sitepu dan Angelius Wake Kako. (*)



Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai (kedua dari kiri) didampingi Ketua Komite III Filep Wamafma (kiri) dan Ketua Komite II Badikenita Br Sitepu (kanan) saat memimpin pertemuan dengan pengembang di lokasi PSN PIK 2, Teluk Naga, Tangerang. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



SENATOR MINTA TAMBAHAN ARMADA PERINTIS DI PAPUA

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Papua Barat, Abdullah Manaray, menyambangi Kantor

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta. Abdullah diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, Direktur Angkutan Udara, Agustinus Budi Hartono, dan Direktur Bandara Udara, Budhi Kurniawan Kresna.

Dalam pertemuan tersebut, Abdullah Manaray meminta Kementerian Perhubungan untuk menambah armada perintis di seluruh pelosok Papua, yang bisa menjangkau sejumlah wilayah tersebut. Sebab, transportasi udara masih menjadi kebutuhan penting beberapa wilayah terpencil provinsi di Tanah Papua.

“Sebaiknya perusahaan maskapai penerbangan bisa menambah armada. Termasuk merapihkan jadwal penerbangan. Karena akibat dari ketidakjelasan penerbangan pesawat perintis dengan pesawat besar seperti boeing atau airbus, penumpang jadi korban,” ujar Abdullah dalam pertemuan tersebut pada Senin



Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua Barat Abdullah Manaray saat melakukan pertemuan dengan pejabat Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. (Foto/dok pribadi)

(25/11/2024).

Menurutnya, masih banyak lokasi di Papua yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Untuk itu, perhubungan antardaerah lebih baik dilakukan melalui udara dengan menambah pesawat perintis. “Ya, pada konteksnya kebutuhan ini di dalamnya Provinsi Papua Barat. Di mana daerah ini membawahi tujuh kabupaten dan untuk menjangkau lewat jalur darat masih sulit, apalagi sampai ke pelosok,” kata Abdullah yang baru untuk periode pertama menjadi

anggota DPD RI.

Pihaknya berharap Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa menjembatani komunikasi dengan pihak perusahaan maskapai agar menambah armada dan jam terbang ke setiap daerah terpencil di seluruh Papua. “Semoga apa yang saya sampaikan ke pihak kementerian dapat dipertimbangkan dan bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait. Terutama para pengusaha bidang maskapai,” harapnya. (*)



SENATOR DPD RI DUKUNG BANGUN KAMPUNG HAJI DI MAKKAH



Kota Makkah. (Foto Viva.com)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jelita Donal mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan jamaah haji dalam menunaikan ibadah haji dan meningkatkan layanan bagi jamaah haji asal Indonesia.

“Ide untuk mendirikan kampung haji di Kota Makkah akan sangat membantu dan memudahkan jamaah haji asal Indonesia dalam menjalankan ibadah haji, terutama ketika melaksanakan rukun haji selama berada di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina),” kata senator dari daerah pemilihan Sumatera Barat itu.

Selama ini kondisi jamaah haji asal Indonesia kerap tidak mendapatkan layanan yang maksimal dibandingkan jamaah haji dari negara lain. Jamaah haji Indonesia sudah berusaha keras untuk mengumpulkan dana untuk berhaji, bahkan dengan masa tunggu keberangkatan haji

yang sangat lama, tapi mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya.

Ini merupakan momentum yang tepat untuk mendirikan kampung haji Indonesia di Kota Makkah, setelah pihak Kerajaan Arab Saudi melalui Pangeran Muhammad Bin Salman (MBS) menyerahkan tanah seluas 50 hektar untuk konsesi 100 tahun. Sehingga sudah selayaknya investasi dana haji dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam, khususnya bagi para jamaah haji Indonesia.

Pembangunan kampung haji di Kota Makkah itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pada pasal 3 huruf a dan c, bahwa pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

“Selama ini, investasi dana haji dilakukan pada bidang yang tidak terkait langsung dengan upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sudah selayaknya investasi dana haji dilakukan pada bidang yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas layanan bagi jamaah haji Indonesia. Kami berharap agar pelaksanaan ibadah haji menjadi semakin baik dan meningkat kualitas layanannya,” pungkas Jelita Donal.

Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang mengirimkan jamaah haji dan umrah terbesar di dunia. Sekitar 241 ribu jamaah haji ditambah hampir 2 juta jamaah umrah asal Indonesia yang pergi ke tanah suci setiap tahunnya. (*)



Jelita Donal
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Bustami Zainudin dalam pertemuan dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung dan perwakilan 28 desa yang belum teraliri listrik. (Foto Antara)

28 DESA DI LAMPUNG BELUM DIALIRI LISTRIK

Sebanyak 28 dari 2.564 desa di Lampung belum mendapatkan pasokan listrik. Oleh karena itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bustami Zainudin, dalam kunjungan kerjanya ke Lampung melakukan pertemuan dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung di Bandarlampung, Senin (25/11/2024). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh 28 kepala desa, kepala kampung, dan kepala pekon, yang desanya belum tersentuh aliran listrik.



Perwakilan desa tersebut diantaranya adalah Pekon Sidorejo dan Roworejo di Kabupaten Lampung Barat, Desa Mataram Udik di Lampung Tengah, Desa Girmulyo, Desa Sindang Anom, Desa Sidorejo, Desa Sadar Sriwijaya di Lampung Timur, serta Pekon Way Haru, Way Tias, Siring Gading, Bandar Dalom, Pagar Bukit di Pesisir Barat.

Kemudian, Desa Talang Batu di Mesuji, Desa Lebak Paniangan, Desa Karta Jaya, Desa Menanga Jaya, Desa Tanjung Raja Sakti, Desa Tanjung Serupa di Way Kanan, Desa Pekon Atar Lebar, Kaca Marga, Taman Sari di Tanggamus, Desa Sukamulya di Lampung Utara, dan Babakan Loa di Pesawaran.

“Kami melakukan pertemuan dengan Kanwil PLN Lampung untuk membahas masih adanya desa tertinggal yang belum teraliri dengan listrik. Desa-desa yang hadir ini sudah kita bahas melalui pertemuan dengan PLN. Mereka juga menyampaikan apa masalahnya yang membuat listrik belum masuk. Ini juga nanti akan menjadi pembahasan kita di tingkat nasional,” kata Bustami usai pertemuan.

Bustami menjelaskan bahwa masalah belum teralirnya listrik di 28 desa

tersebut lantaran masih adanya desa yang dianggap berstatus desa kawasan hutan. Padahal, lanjut dia, kondisi desa tersebut telah berubah yang artinya tidak lagi menjadi kawasan hutan atau ilegal.

“Ini yang akan kita jelaskan kepada PLN bahwa 28 desa di beberapa kabupaten tersebut statusnya sudah berubah menjadi

Hukum Tanah Nasional (HTN). Artinya jika berubah maka sudah tidak disebut ilegal lagi,” kata senator dari Lampung itu. (*)



Ilustrasi: Istimewa



Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menerima audiensi FOKUS DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

GKR HEMAS TERIMA ASPIRASI STAF ANGGOTA DPD RI

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas, menerima audiensi dari FOKUS DPD RI, organisasi staf anggota DPD RI yang terdiri dari 38 provinsi. Dalam pertemuan ini, mereka menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan dan peningkatan kapasitas staf anggota, serta sinergitas FOKUS DPD RI dengan pimpinan DPD RI.

“Kami dari FOKUS menyampaikan terima kasih atas penerimaan audiensi dan silaturahmi ini, Bu Ratu. Sudah sejak lama memang kami FOKUS mau melakukan kunjungan, baik kepada pimpinan maupun kesekjenan. Alhamdulillah hari ini terlaksana di sela-sela kesibukan Ibu Wakil Ketua. Kami mewakili seluruh staf anggota menyampaikan selamat atas terpilihnya Bu Ratu sebagai Wakil Ketua DPD RI,” ujar Ketua Umum FOKUS, Khairuddin Zainu, dalam audiensi tersebut pada Senin (18/11/2024).

Albion, Sekjen FOKUS, menyampaikan beberapa aspirasi yang banyak disuarakan oleh para staf anggota DPD RI, salah satunya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum direalisasikan. Mereka mengharapkan premi BPJS Ketenagakerjaan untuk staf anggota ditanggung oleh Setjen DPD RI, seperti halnya BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menyambut baik audiensi ini serta mendukung peningkatan kapasitas staf anggota dan kesejahteraannya. Hemas menekankan bahwa peningkatan kapasitas staf anggota sangat penting, seperti pembekalan yang beberapa waktu lalu difasilitasi oleh Kesekjenan DPD RI. Beliau menyatakan bahwa kegiatan seperti itu harus terus diselenggarakan, mungkin bisa setiap masa sidang atau setiap tahun untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkembang.

“Selain peningkatan kapasitas, kesejahteraan pegawai juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Saya sudah sampaikan pada Sekjen DPD RI dan seluruh staf kesekjenan agar kesejahteraan pegawai harus lebih diperhatikan, termasuk di dalamnya staf pendukung anggota,” kata Ratu Hemas. (*)



KOMITE III DPD RI SOROTI MUTU PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Agama (Kemenag), di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (2/12/24). Dalam rapat perdana dengan mitra kerjanya itu, Komite III menyoroti mutu pendidikan keagamaan di Indonesia, terutama nasib para guru agama.

“DPD RI memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk dalam bidang agama, pendidikan, sosial, terutama nasib para guru agama, dan guru madrasah swasta, agar diperhatikan oleh Kementerian Agama,” kata Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma didampingi Wakil Ketua Komite III Dailami Firdaus, Jelita Donal, dan Erni Daryanti.

Komite III melihat masih banyak pendidik atau guru di bawah Kemenag yang berstatus non ASN dan belum mendapatkan sertifikasi. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah guru madrasah yang telah tersertifikasi hingga saat ini hanya 39,2%. Sehingga masih terdapat 484.737 (atau 60,8%) guru madrasah yang belum mengantongi sertifikat pendidik, begitu juga pendidikan agama lainnya.

Karena itu, Komite III mendorong agar anggaran Kemenag TA 2025, khususnya untuk fungsi pendidikan, dialokasikan pada sertifikasi guru, peningkatan sarana dan prasarana perguruan tinggi keagamaan negeri, pemenuhan kekurangan anggaran pada operasional pendidikan, serta program revitalisasi madrasah dan sekolah.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menje-



Pimpinan dan Anggota Komite III foto bersama dengan Menteri Agama dan jajarannya usai mengadakan rapat kerja di Gedung DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

laskan, dalam upaya mempercepat Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru madrasah, guru pendidikan agama Kristen, guru pendidikan agama Katolik, guru pendidikan agama Hindu, guru pendidikan agama Buddha, Kemenag pada tahun 2025 telah merencanakan percepatan penyelesaian PPG bagi guru dalam kurun waktu dua tahun. “Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan sedang mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan pembiayaan PPG tahun 2025,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i juga langsung menanggapi sekaligus menyoroti berbagai persoalan isu-isu krusial yang meliputi penguatan pendidikan agama berbasis karakter, optimalisasi layanan haji dan umrah, serta beberapa persoalan keagamaan lainnya.

Disebutkan, Kementerian Agama telah menyiapkan 3 area dalam rangka pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nasional, yaitu mempersiapkan peserta didik di lingkungan Kemenag sebagai penerima bantuan gizi. Program ini mencakup madrasah/sekolah keagamaan, dan pesantren, revitalisasi sarana dan prasarana madrasah, serta rekrutmen calon ASN. (*)





TINDAKLANJUTI ADUAN MASYARAKAT, BAP PANGGIL MENTERI ATR/BPN

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dan Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim dalam rapat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada Kamis, 28 November 2024, di Gedung DPD RI. RDP ini berfokus pada isu sengketa lahan dalam Proyek Strategi Nasional (PSN), khususnya PSN Penyediaan Pangan Nasional/*Food Estate* di Papua Selatan dan PSN Pariwisata PIK2.

Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim, menekankan keprihatinan mendalam terhadap hambatan dalam pelaksanaan PSN, terutama konflik agraria yang melibatkan tanah milik masyarakat hukum adat. “Kami meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa lahan

di kawasan PSN PIK2 dan *Food Estate* di Papua Selatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Abdul Hakim.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, yang juga hadir dalam rapat, menyoroti kerusakan lingkungan dan isu ganti rugi serta kehilangan kesempatan kerja yang diakibatkan oleh proyek-proyek tersebut. Tamsil menegaskan bahwa proyek-proyek PSN harus mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, bukan menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat karena pengambilan tanah mereka.

Anggota DPD RI dari Provinsi Banten, Abdi Sumaithi, membahas dampak dari proyek PIK2, yang akan menyebabkan puluhan ribu masyarakat harus pindah, kehilangan lahan dan mata pencaharian. Ia mendesak agar proyek tersebut ditunda hingga ada solusi yang lebih aman bagi masyarakat setempat.

Yoseph Yanawo Yolmen, Kepala Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua Republik Indonesia (BP3OKP RI) Perwakilan Provinsi Papua Selatan, menyatakan bahwa sosialisasi PSN di Papua Selatan kurang efektif, terhambat oleh transisi pilkada dan pergantian Penjabat Gubernur.

Selain itu, masalah tanah di Nusa Tenggara Barat juga disampaikan oleh Anggota DPD RI dari Provinsi NTB, TGH. Ibnu Halil. Ia mengungkapkan, “HGB milik PT. Lingga yang berakhir pada tahun 2012 tidak pernah digarap, sementara tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat. Kami meminta peninjauan langsung ke lokasi.”

Menanggapi hal ini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, “Area yang masuk dalam PSN hanya 1.755 hektar, dimana 1.500 hektar berada dalam kawasan hutan sesuai SK Kepmen LHK No. 398 Tahun 2024.” Nusron menambahkan bahwa perlu ada penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN jika terdapat ketidaksesuaian dalam RTRW.

Kementerian ATR/BPN berencana meninjau status lahan di lokasi PSN *Food Estate* Papua Selatan dan Nusa Tenggara Barat, mengingat pentingnya menyelesaikan masalah tata ruang dan hak atas tanah yang bersih dan jelas, termasuk hak-hak adat, untuk memastikan kepatuhan dan pelepasan adat oleh masyarakat setempat. (*)



Ilustrasi: Istimewa

Komite IV DPD RI Pertanyakan Kebijakan Perpajakan Pemerintah:

AGAR TIDAK MEMBEBANI MASYARAKAT

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (3/12/24), bertujuan untuk memperdalam materi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara dan Daerah. RDPU ini dihadiri oleh Prof. Tjip Ismail, pakar hukum perpajakan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Militer (STHM), yang menekankan peran dominan pajak dalam struktur APBN. “Tarif PPh Badan turun dari 25% menjadi 20% dari tahun 2020 hingga 2022, sementara tarif PPN naik dari 10% menjadi 12% pada tahun 2025,” jelas Prof. Tjip.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komite IV Novita Annakota tersebut, anggota DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, menyuarakan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak perubahan tarif pajak tersebut. “Kaum menengah yang seharusnya mendapat perlindungan malah semakin teraniaya, turun kelasnya. Apa benar kondisi seperti ini?” tanyanya, mencerminkan kegelisahan wakil rakyat.

Senator Yashinta Sekarwangi Mega dari Daerah Istimewa Yogyakarta



Foto bersama pimpinan dan anggota Komite IV usai mengadakan RDPU dengan Prof. Tjip Ismail, pakar hukum perpajakan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Militer (STHM). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

menggal lebih dalam mengenai efektivitas kenaikan PPN. “Seberapa efektif kenaikan PPN dalam meningkatkan pendapatan negara, dan bagaimana dampaknya terhadap konsumsi masyarakat?” tanya Yashinta, mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang *trade-off* kebijakan tersebut.

Dari Provinsi Banten, Senator Habib Ali Alwi mengkritik keras kebijakan perpajakan yang berat sebelah. Jihan Fahira dari Provinsi Jawa Barat menanyakan mengenai alokasi dana dari pajak tertentu. “Pajak dari nomor polisi, itu masuk ke kementerian atau ke kepolisian ya?” tanya Jihan, mencari kejelasan mengenai distribusi pendapatan pajak.

Muhammad Nuh dari

“**Negara seharusnya menggunakan pajak untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mengutamakan penerimaan negara,” ucap Habib, menambahkan, “Gausah masyarakat dikenakan pajak macam-macam lagi.**”

**Senator
Habib Ali Alwi**

Sumatera Utara mencoba membandingkan beban pajak di Indonesia dengan negara-negara ASEAN. “Kita ini posisi pajaknya terberat, sedang, atau paling ringan di ASEAN?” tanya Nuh

Rudy Tirtayana dari

Provinsi Papua Selatan, menanyakan spesifik tentang kebijakan terbaru. “Kenaikan PPN menjadi 12% itu tidak semua komoditas, apakah benar?” ucap Rudy, Sementara Novita Annakota, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, mengakhiri diskusi dengan pertanyaan strategis, “Yang perlu kita naikkan itu PPN atau PPh Badan? Dan apakah dengan menaikkan PPN itu presiden bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%?”

Hasil rapat ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan instansi terkait, dengan Novita Annakota yang memimpin dan mengapresiasi keseluruhan pemaparan dan pendalaman yang dibawakan oleh Prof. Tjip Ismail. (*)



SETJEN DPD RI GELAR PRESS GATHERING DENGAN WARTAWAN PARLEMEN

Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berupa *Press Gathering*, dilaksanakan selama tiga hari, dari Jumat hingga Minggu (22-24/11/2024) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 wartawan dari berbagai media nasional.

Acara yang bertema “Kolaborasi Inklusif untuk Percepatan Pembangunan Daerah: DPD RI dalam Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2045” dibuka oleh Ketua DPD RI

Sultan B Najamudin di Cavinton Hotel. Hadir pula tiga Wakil Ketua DPD RI seperti GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung serta pimpinan alat kelengkapan dan anggota DPD RI asal Yogyakarta.

Dalam hantaran katanya, Plh. Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir menegaskan pentingnya percepatan pembangunan daerah sebagai agenda utama menuju Indonesia Emas 2045. “Dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI adalah upaya kami agar kerja DPD RI dapat berjalan secara efektif dan efisien,” ujar Lalu.



Plh. Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Forum ini juga menjadi ajang diskusi antara wartawan dengan pimpinan dan anggota DPD RI dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Media memiliki peran penting dalam membangun jembatan antara DPD RI dan masyarakat, menciptakan opini publik yang positif,” tambahnya.

Selain diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan *outbond* yang melibatkan para wartawan di Asram Edupark pada hari kedua, dan di malam hari mereka menghadiri kegiatan silaturahmi yang turut dihadiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X di Pagelaran Keraton Yogyakarta.

Sekretariat Jenderal DPD RI berkomitmen memanfaatkan kekuatan media untuk menyampaikan informasi serta membangun kesadaran publik akan pentingnya peran DPD RI dalam pembangunan daerah. “Kolaborasi dengan media adalah kunci dalam memperkuat peran DPD RI,” pungkask Lalu. (*)

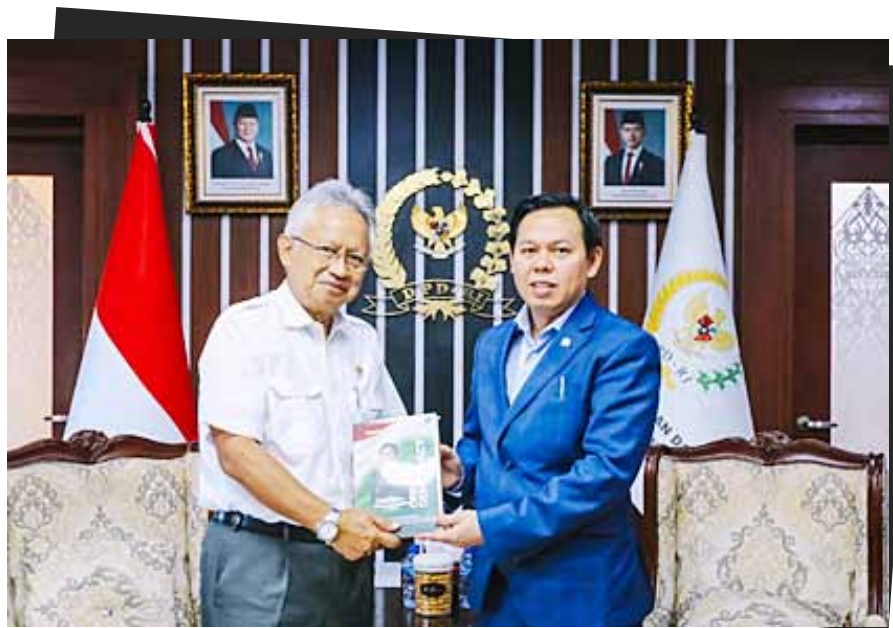


Foto bersama para wartawan dengan Anggota DPD RI periode 2019-2024 asal DIY Hafid Asrom usai diskusi di Al Azhar Yogyakarta World School. (Foto Biro PHM DPD RI).

SERAHKAN BUKU:

Saat bertemu Menristek Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro di ruang kerja ketua DPD RI Senayan Jakarta pada Selasa (03/12), Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyerahkan buku biografinya kepada sang tamu.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan juga minta kampus bisa menjadi Pusat Kajian Riset dan Kemudahan Uang Kuliah Tunggal (UKT). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**DOKUMEN RAPAT:**

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas langkah-langkah menghadapi maraknya judi online di Gedung DPD RI, Selasa (3/12/24). Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Usai rapat, Ketua Komite IV DPD RI AA Ahmad Nawardi menyerahkan 11 hasil keputusan rapat kepada perwakilan HIMBARA. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam melakukan pengawasan terhadap undang-undang tersebut, Komite II DPD RI yang dipimpin Ketuanya Badikenita Br. Sitepu melakukan audiensi dengan masyarakat Papua terkait pembangunan *Food Estate* pada Senin (02/12) di Merauke, Papua Selatan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





KETERWAKILAN TIMUR DALAM PEMERINTAHAN

Oleh:

R Graal Taliawo/Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara

Indonesia akan menyongsong agenda besar dalam masa pemerintahan Prabowo ke depan. Masih dalam ingatan, Presiden Republik Indonesia ke-8 (melalui pidato pelantikan 20/10) dengan tegas dan tak gentar mengatakan bahwa Indonesia akan swasembada pangan dan energi serta hilirisasi semua komoditas yang dimiliki. Peran para perpanjangan tangan Presiden (baca: menteri) sangat krusial dalam mendukung pencapaian agenda ini. Komposisi keterwakilan menteri pada Kabinet Merah Putih menjadi sorotan. Dari 48 kementerian, tidak ada keterwakilan secara deskriptif/fisik untuk beberapa provinsi, sedangkan ada provinsi yang memiliki keterwakilan lebih dari satu orang.

Ide baik perlu dieksekusi dengan baik pula supaya bisa terwujud. Kita memiliki modal untuk bisa dan mampu mencapai itu. Untuk merealisasikan ide tersebut, kita perlu realistis melihat tantangannya. Isu kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di tengah guyuran investasi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi, yakni pada Maret 2024 ada sekitar 9,03% atau 25.220.000 jiwa (dari total sekitar 279.291.252 jiwa) (bps.go.id). Digadang-gadang siap menjadi lumbung pangan nasional, tapi angka impor beras kita mencapai

3.062.857,6 ton pada 2023—jumlah terbesar selama lima tahun terakhir (bps.go.id).

Maluku Utara: Ketimpangan dan Potensi

Jika melihat data, umumnya ada ketimpangan antara Indonesia secara nasional dengan wilayah Timur, termasuk Maluku Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2023 menunjukkan Indonesia berada pada angka 73,55 sedangkan Maluku Utara adalah 70,21. Padahal, kontribusi Maluku Utara terhadap perekonomian nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Dilansir dari laman Kompas.id, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM), hingga 2022 total investasi yang masuk ke Maluku Utara mencapai 9,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 150 triliun. Mayoritas investasi masuk ke sektor pertambangan dan pengolahannya.

Tak hanya itu, potensi perikanan dan pertanian Maluku Utara belum tersentuh secara komprehensif sehingga pemanfaatannya pun belum optimal. Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur menetapkan wilayah perairan Maluku Utara masuk dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yakni 715, 716, dan 717. Mongabay.co.id (2023) merilis potensi WPP di 3 kategori tersebut mencapai angka fantastis 1.714.158 ton. Namun, produksi perikanan tangkap di laut Maluku Utara pada 2022 baru sekitar 20,82%, hanya mencapai 356.982 ton dengan nilai Rp7.787.193.797,00 (malut.bps.go.id).

Dari sisi pangan, wilayah Timur Indonesia memiliki pangan lokal yang kaya gizi, misalnya sorgum di Nusa Tenggara Timur serta pisang, kasbi (singkong), batatas (ubi jalar), sagu, dan bete (talas) yang melimpah di Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Tentu ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sumber keragaman pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan ba-



han pangan secara berkelanjutan.

Energi baru dan terbarukan (EBET) menjadi salah satu isu mengemuka saat ini. EBET menjadi energi alternatif berkelanjutan yang ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon. Wilayah Maluku dan Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan sumber EBET yang cukup besar yakni 738 gigawatt, yang berasal dari panas bumi, hidro, tenaga surya, dan biomassa (kompas.com).

Potensi ini memvalidasi yang Prabowo sebut bahwa Indonesia dilimpahkan karunia yang besar dan beragam, kekayaan alam yang besar. Maluku Utara memiliki modal utama untuk mendukung agenda besar ke depan dan mampu berkontribusi untuk pembangunan nasional. Perlu ada perpanjangan tangan yang bisa menyuarakan ketimpangan ini dan mengeksekusi potensinya secara baik dan benar. Yang diharapkan ujungnya, pertumbuhan ekonomi kelak bisa berdampak positif dan dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara dan masyarakat Indonesia.

Keterwakilan Deskriptif dan Substansial

Dalam konteks tersebut, aspek keterwakilan penting untuk dibahas dan diperhatikan dalam penyusunan komposisi menteri di kabinet. Utamanya untuk menyuarakan ketimpangan yang terjadi di daerah selama ini, sekaligus untuk menyuarakan pemanfaatan potensi yang bisa digali untuk kepentingan masyarakat. Keterwakilan berarti

kehadiran deskriptif (secara fisik) dan/atau kehadiran substantif (secara ide). Kehadiran keduanya adalah yang ideal. Bukan hanya masuk dalam komposisi, tapi juga paham situasi lapangan secara menyeluruh.

Meminjam teori *Politic of Presence*-nya Anne Phillips (*The Politics of Presence, 1995*), agen harus terlibat dalam pembuatan keputusan dan kebijakan, mewakili suara masyarakat lainnya yang diwakilkan. Dengan begitu, suara dan kebutuhan mereka akan terdengar. Teori keterwakilan selanjutnya adalah teori *Politic of Ideas*, keterwakilan substantif yang lebih mengarah pada intisari dari ide yang disuarakan (Anne Phillips, 1995).

Bentuknya (opsi pertama) adalah keterwakilan daerah di jabatan-jabatan strategis tertentu. Adanya keterwakilan asal daerah pada jabatan strategis ini tentu berpeluang menghasilkan kebijakan dan program yang lebih kontekstual serta representatif, sebab mereka lebih dekat dengan kondisi kewilayahannya atau kebutuhan daerahnya.

Meski demikian, ketiadaan keterwakilan Maluku Utara dalam kabinet Merah Putih ini bukanlah masalah. Bila perwakilan di level menteri belum dimungkinkan, (opsi kedua) maka kiranya pos jabatan strategis kementerian di tataran eselon pun tidaklah soal dan lebih dari cukup. Substansinya adalah adanya keterwakilan daerah wilayah timur Indonesia dalam tataran perumusan kebijakan strategis nasional demi dan sebatas agar tidak merasa ditinggalkan.

Hal paling pokok adalah ru-

ang dan kesempatan bagi semua wilayah untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan. Opsi ketiga adalah melibatkan kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan masyarakat Maluku Utara. Besar harapan bahwa pemerintah akan membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat Maluku Utara dan wilayah Timur lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan bisa mengakomodasi permasalahan daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi tiap-tiap daerah di wilayah Indonesia Timur lainnya.

Yang perlu ditekankan adalah tidak cukup hanya hadir secara fisik sebagai perwakilan, tapi juga perlu hadir secara ide demi terwujudnya kebijakan yang mengakomodasi kepentingan daerah. Opsi keempat adalah setiap kebijakan publik (siapa pun yang terlibat dalam perumusan) perlu mengakomodasi permasalahan daerah. Tak mengenal asal daerah, asalkan dia paham dan mampu untuk menyuarakan isu-isu yang ada di wilayah Timur Indonesia termasuk Maluku Utara.

Lebih dari sekadar kuantitas, komposisi keterwakilan juga harus perhatikan kualitas. Prinsip keadilan harus dikedepankan dan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia. Memahami konteks daerah (baik ketimpangan maupun potensinya) adalah kunci untuk menjamin agenda besar yang diimpikan bisa tercapai dengan mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk masyarakat di daerah. (*)



ME NU

EMPAT KULINER PALING DICARI DI KOTA KENDARI

Four Most Sought-After Delicacies in Kendari

1 Kasuami



(Foto Ufuknews.com)

Kasuami adalah makanan pokok khas Kendari yang terbuat dari ubi kayu yang diparut dan diperas, kemudian dikukus hingga matang. Teksturnya yang kenyal dan cara penyajiannya yang unik membuat kasuami sangat populer di kalangan masyarakat setempat. Kasuami biasanya di-sajikan dengan ikan bakar atau ikan asin, lengkap dengan sambal yang pedas yang menambah kelezatan hidangan ini.

Kasuami is a typical staple food of Kendari, made of grated cassava which is then squeezed and steamed until it is done. The chewy texture with its unique serving makes kasuami popular among the local. Kasuami is normally served with grilled fish or salted fish, completed with hot chili paste which improves the savor of the dish.

2 Lalampa



(Foto In Indonesia.com)

Lalampa adalah jenis kue tradisional yang dibuat dari nasi yang dicampur dengan ikan cakalang atau tuna, dibungkus dengan daun pisang, dan dikukus. Lalampa memiliki cita rasa yang gurih dan sedikit manis, dengan aroma daun pisang yang harum. Lalampa sering kali dijadikan sebagai sajian dalam berbagai acara adat atau sebagai oleh-oleh khas Kendari.

Lalampa is a kind of traditional cake made from rice mixed with skipjack tuna, wrapped in banana leaves, and then steamed. Lalampa has a rather sweet savory taste, with a sweet scent of the banana leaf. It is often served in various traditional events and is a typical snack gift of Kendari.

ME NU

3 Sinonggi



(Foto traveler paruh waktu)

Sinonggi adalah bubur tradisional dari Kendari yang terbuat dari sagu. Bubur ini memiliki tekstur yang lembut dan biasanya disajikan dengan kuah santan yang kaya rempah, ditambah dengan lauk seperti ikan atau sayur. Sinonggi tidak hanya lezat tapi juga sangat mengenyangkan, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk sarapan atau makan siang yang berat.

Sinonggi is a traditional porridge of Kendari made of sago. The porridge has a soft texture and is usually served with spice-rich coconut oil soup, added with dishes such as fish or vegetables. Sinonggi is not only delicious but also very fulfilling which make it a perfect choice for breakfast or solid lunch.

4 Ikan Bakar Raha / Raha Grilled Fish



(Foto instagram)

Raha adalah nama salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan ikan bakarnya. Ikan bakar Raha biasanya menggunakan ikan segar yang dibumbui dengan campuran bumbu khas yang meresap ke dalam daging ikan, lalu dibakar hingga kecokelatan. Disajikan dengan sambal khas dan irisan jeruk limau, ikan bakar Raha menawarkan pengalaman kuliner yang tidak terlupakan bagi siapa pun yang mencobanya.

Raha is a name of one of the areas within South East Sulawesi which is famous for its grilled fish. Raha grilled fish is usually a fresh fish marinated with typical seasoning which soaks into the fish meat and then it is grilled until its color turns brownish. Served with typical chili paste and slice of lime, Raha grilled fish offers unforgettable culinary experience to whosoever gives it a try.



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

*Selamat Hari Natal
&
Tahun Baru*

25 Desember 2024 - 1 Januari 2025



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

